KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Fadli Zon: Korupsi Memperburuk Ketimpangan
Tanggal : Selasa, 18 April 2017
Surat Kabar : Republika
Halaman : 2

Fadli Zon: Korupsi Memperburuk Ketimpangan

Isu ketimpangan menjadi topik utama yang dibahas dalam Sidang Tahunan Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-136 di Dhaka, Bangladesh. Pada sidang yang berlangsung 1 hingga 5 April 2017 itu, Indonesia mengirimkan tujuh delegasi anggota parlemen yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan, Dr Fadli Zon, M.Sc.

Menyertai Fadli Zon, di antaranya adalah Dr. Nurhayati Ali Assegaf (Fraksi Demokrat), Dr. Evita Nursanty (PDI-P), Dr. Anthon Sihombing (Golkar), Irine Yusiana Roba Putri (PDI-P), Andi Irawan Darmawan Aras (Gerindra), dan Ferry Kase (Hanura).

Dalam forum Debat Umum, Fadli Zon menyampaikan isu ketimpangan, sekaligus menunjukkan bahwa persoalan tersebut kembali menjadi masalah serius di tingkat global, sebagaimana yang terjadi pada dekade 1970-an.

Menurut Fadli Zon, tantangan ketimpangan kini semakin besar. Di Indonesia, misalnya, selain ketimpangan pendapatan dan pengeluaran yang angka indeksnya pernah mencapai 0,42 pada 2015, juga terdapat ketimpangan kepemilikan lahan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS 2013), indeks gini tanah nasional mencapai angka 0,72. Sebagai gambaran konkret, sekitar 56 persen lahan yang ada di Indonesia hanya dikuasai oleh dua persen elite saja. Bagi negara agraris seperti Indonesia, kata dia, ketimpangan tersebut tentu saja berimplikasi buruk.

Sekitar 56 persen dari penduduk pedesaan hanya bisa menjadi buruh tani, atau petani gurem. Hal ini telah berdampak pada angka kemiskinan di pedesaan, di mana sebanyak 62,75 persen penduduk miskin berasal dari desa, dan sebagian besarnya adalah petani.

Untuk mengatasi masalah ketimpangan, Indonesia menurut politisi Partai Gerindra ini telah meningkatkan anggaran pendidikan dan kesehatan. Langkah ini diharapkan agar masyarakat miskin bisa mendapatkan akses yang sama terhadap dua kebutuhan vital tersebut. Namun, upaya menangani ketimpangan tak cukup dilakukan hanya dengan menangani efeknya saja, tapi juga harus dengan menyasar faktor penyebabnya.

"Indonesia percaya, secara ekonomi masalah ketimpangan tidak bisa diatasi hanya dengan menciptakan lapangan kerja. Kita harus lebih spesifik mengupayakan tingkat upah yang layak di berbagai sektor untuk mengatasi masalah tersebut," katanya.

Menurut Fadli Zon, kondisi ketimpangan secara global juga terus memburuk. Satu persen orang terkaya di dunia, menurut kajian yang dilakukan oleh Oxfam, memiliki kekayaan setara dengan kekayaan 99 persen penduduk dunia. Perang, konflik, dan instabilitas yang terjadi di sejumlah kawasan ikut berkontribusi mempersulit situasi ketimpangan tersebut.

FOTO DOKUMEN DPR RI

Wakil Ketua DPR Fadli Zon didampingi oleh Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf, anggota BKSAP Anthon Sihombing, Ferry Kase dalam sidang tahunan Inter-Parliamentary Union (IPU).

Secara struktural, ulas Fadli, isu ketimpangan sebenarnya merupakan panggilan untuk membangun sistem perpajakan yang adil, terutama melalui penerapan pajak progresif yang signifikan. Masalah ini tentu diperlukan penyesuaian antara hukum perbankan dengan perpajakan guna memperkecil ruang gerak dan munculnya para pengemplang pajak. Sebab, pajak merupakan instrumen penting untuk melakukan redistribusi kemakmuran.

"Secara global kita harus menyambut baik perjanjian Automatic Exchange of Information (AEoI) yang akan berlaku pada 2018. Perjanjian itu merupakan sarana untuk membuka informasi perpajakan. Hanya dengan sistem pajak yang adil kita bisa memperkecil ketimpangan," ujarnya.

Korupsi dan ketimpangan

Fadli, yang merupakan President GOPAC (Global Organization of Parliamentarians Against Corruption), menggarisbawahi bahwa salah satu penyebab terjadinya ketimpangan adalah korupsi. Katanya, ada banyak negara menderita karena korupsi, sebab korupsi telah meminggirkan rakyat dari proses pengambilan kebijakan yang adil dan demokratis, yang kemudian berakibat pada terabaikannya hak-hak dasar mereka.

"Tak akan pernah ada kesetaraan selama masih ada korupsi. Itu sebabnya GOPAC selalu mengajak seluruh anggota parlemen di dunia untuk bersama-sama memerangi korupsi sebagai usaha mengatasi ketimpangan," Fadli menegaskan.

Dalam posisi sebagai pembuat undang-undang, pengawas pelaksanaan undang-undang oleh pemerintah, serta sebagai pengawas dan pengontrol anggaran, anggota parlemen, menurut Wakil Ketua DPR RI ini, memainkan peran penting dalam gerakan pemberantasan korupsi untuk mereduksi ketimpangan. "Hanya dengan pembangunan tanpa korupsilah kesetaraan dan keadilan bisa dicapai."

Di sisi lain, ia juga menekankan bahwa pembangunan ekonomi harus didesain semakin inklusif, tidak boleh hanya terjebak pada indikator pertumbuhan semata. Untuk menciptakan pembangunan inklusif itu diperlukan mekanisme penyusunan kebijakan yang bersifat inklusif pula, agar kebijakan publik yang dihasilkan lebih demokratis dan inklusif.

Kerja sama

Di sela-sela jadwal sidang yang ketat, delegasi parlemen Indonesia memenuhi undangan *bilateral meeting* dari delegasi empat negara, yaitu Georgia, Thailand, Irak, dan Jepang. Keempat negara tersebut mengharapkan kerja sama internasional yang lebih erat, baik di antara sesama lembaga parlemen, maupun mewakili kepentingan diplomatik masing-masing negara.

Delegasi Georgia, misalnya, menyampaikan keinginannya untuk membentuk grup kerja sama parlemen dengan Indonesia. Sementara, delegasi parlemen Thailand sangat berharap bisa menjadi bagian penting dari GOPAC. Adapun delegasi Irak dan Jepang berharap agar kerja sama ekonomi antara pemerintah Indonesia dengan kedua negara bisa semakin erat. Irak, misalnya, menyampaikan harapan agar Indonesia bisa segera membuka penerbangan langsung Jakarta-Baghdad, mengingat situasi di Irak saat ini sudah lebih kondusif.

Selain pertemuan-pertemuan bilateral, selama di Dhaka rombongan delegasi parlemen Indonesia juga menyempatkan diri untuk bertemu dengan warga Indonesia yang mukim di Bangladesh. ● ril